

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

TENTANG  
 PERSEROAN DAERAH  
 BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA

ACUAN

1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH
3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
5. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
6. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
7. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA
8. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA
9. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
10. SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5 /POJK.03/2015 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT

Perubahan/penambahan, pepadatan, atau pengurangan	Raperda Perseroda	Ketentuan Rujukan
	Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian Daerah;  b. bahwa dalam upaya mewujudkan pengembangan perekonomian Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Salatiga telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;	

	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda);	
	<p>Mengingat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);</li> <li>e. Undang-Undang nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah</li> <li>f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang</li> <li>g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</li> </ul>	<p>c. catatan</p> <p>UU No.11 Tahun 2023</p>
	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA (PERSERODA)	
	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	<p>Merujuk pada pasal 1 Ketentuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.4 Tahun 2023</li> <li>2. UU No.40 Tahun 2007</li> <li>3. PP No.54 Tahun 2017</li> </ol>

<p>Penambahan unsur sesuai pasal 1 PP No 54 Th 2017 ayat (13)</p> <p>Perubahan unsur sesuai pasal 1 PP No 54 Th 2017 ayat (1) akibat perubahan Nomenklatur dari Perumda menjadi Perseroda</p> <p>Perubahan unsur sesuai pasal 5 PP 54 Th 2017 merujuk pada pasal 1 UU No 40 Tahun 2007 tentang perubahan Perumda menjadi Perseroda (PT)</p> <p>Perubahan unsur sesuai pasal 314 huruf c UU No 3 Th 2023, seluruh Bank Perkreditan Rakyat harus berubah nomenklatur maksimal 2 tahun setelah diundangkan (12 Januari 2025)</p> <p>Perubahan unsur sesuai pasal 1 PP 54 Th 2017 ayat 1 sehingga kepemilikan tidak harus 100% milik Pemda</p> <p>Penambahan unsur sesuai dengan PP No 54 Th 2017 pasal 5 ayat (2) tentang Perseroda minimal 51% dimiliki oleh Pemda</p>	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kota Salatiga.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.</li> <li>3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.</li> <li>4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Salatiga.</li> <li>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.</li> <li>6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.</li> <li>7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.</li> <li>8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Salatiga.</li> <li>9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.</li> <li>11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.</li> <li>12. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.</li> <li>13. Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.</li> <li>14. Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.</li> <li>15. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.</li> <li>16. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Salatiga (Persero) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya dibagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling</li> </ol>	<p>4. Permendagri No.94 Tahun 2017</p> <p>Pasal 13 ayat 13 PP No.54 Th 2017</p> <p>Pasal 1 ayat 1 PP No.54 Th 2017</p> <p>Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 4 tahun 2023</p> <p>Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 4 tahun 2023</p> <p>Pasal 1 ayat 1 PP No.54 Tahun 2017 memperhatikan POJK Nomor 7 Tahun 2024 dan POJK Nomor 9 Tahun 2024</p> <p>Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017, dan Pasal 1 ayat 5 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017</p>
--	---	---

<p>Penambahan sebagai penjelas ayat 16</p> <p>Penambahan sesuai pasal 1 ayat 15 PP No 54 Th 2017 akibat perubahan Perumda menjadi Perseroda</p> <p>Penambahan sesuai dengan UU No 40 Th 2007 pasal 1 ayat (6) merujuk pasal 1 ayat (2) tentang organ akibat perubahan badan Hukum dari Perumda menjadi Perseroda</p> <p>Penambahan sesuai POJK No 9 Th 2024 pasal 59, apabila modal dasar melebihi Rp 50 M maka BPR wajib membentuk Komite Dewan Audit, Pemantau Risiko, dan Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Penambahan sesuai pasal 3 ayat (1) dan (3) PP No 54 Th 2017 tentang kepemilikan saham Pemerintah Daerah</p> <p>Pemadatan makna pada Perda No 5 Th 2020 pasal 121 dan 122 dan disahkan oleh RUPS akibat perubahan bentuk badan hukum merujuk Permendagri No 94 Th 2017 pasal 82 ayat (3)</p> <p>Pemadatan pada Perda No 5 Th 2020 pasal 129, 130, dan 131 BAB XII</p>	<p>sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga.</p> <p>17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.</p> <p>18. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>19. Komite adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bertugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>20. Direksi adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.</p> <p>21. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>22. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)</p> <p>23. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.</p> <p>24. Laba bersih adalah laba PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak dan disahkan oleh RUPS.</p> <p>25. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>26. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.</p> <p>27. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.</p>	<p>Pasal 1 ayat 15 PP Nomor 54 Tahun 2017, dan Pasal 1 ayat 8 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017</p> <p>Pasal 1 ayat 11 Permendagri No.94 Th 2017, Pasal 1 ayat 19 POJK 7 Th 2024, dan Pasal 1 ayat 4 POJK 9 Th 2024</p> <p>Pasal 59 POJK 9 Tahun 2024 Bagian Ketiga Komite Dewan Komisaris</p> <p>PP Nomor 54 Tahun 2017 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017</p> <p>PP Nomor 54 Tahun 2017</p> <p>Pasal 1 ayat 13 Permendagri No.94 Th 2017</p>
--	---	---

<p>Penambahan sesuai PP 54 Th 2017 pasal 123, 124, 125, dan 126 BAB XII</p> <p>Penambahan sesuai UU No 40 Th 2007 Pasal 1 ayat (3) kewajiban perseoran akibat perubahan bentuk badan hukum</p> <p>Pemadatan dari Perda No 5 Th 2020 pasal 3 merujuk pada PP No 54 Th 2017 pasal 15, Permendagri No 94 Th 2017 pasal 7, dan POJK No 9 Th 2024 pasal 15</p>	<p>28. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.</p> <p>29. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.</p> <p>30. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>31. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah kewajiban dan /atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam Pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.</p> <p>32. Kantor Pusat adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang berkedudukan di Kota Salatiga.</p> <p>33. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.</p>	
<p>Perubahan sesuai UU No 4 Th 2023 pasal 314 dan PP No 54 pasal 14 akibat perubahan bentuk badan hukum dan perubahan nomenklatur</p> <p>Perubahan sesuai Permendagri No 94 Th 2017 dan PP No 54 Th 2017 pasal 4 ayat (4) dan (5)</p>	<p style="text-align: center;">BAB II NAMA, BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga diubah bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah dengan nama PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan perubahan bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban,</p>	<p>UU Nomor 4 tahun 2023</p> <p>Pasal 21</p> <p>BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi</p> <p>(PP No 54 Tahun 2017/ Bagian keempat Perda Pendirian BUMD)</p> <p>(UU No 4 Tahun 2023/ Pasal 314 Ketentuan Peralihan Terkait Perbankan dan Perbankan Syariah)</p>

<p>Perubahan sesuai Permendagri No 94 Th 2017 dan PP No 54 Th 2017 pasal 4 ayat (4) dan (5)</p> <p>Pemadatan dari Perda No 5 Th 2020 pasal 3 merujuk pada PP No 54 Th 2017 pasal 15, Permendagri No 94 Th 2017 pasal 7, dan POJK No 9 Th 2024 pasal 15</p>	<p>dan hubungan kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih pada PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Salatiga.</li> <li>2. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	
<p>Perubahan sesuai POJK No 9 Th 2024 pasal 2 ayat (2) dan UU No 4 Tahun 2024 secara umum tentang prinsip pengelolaan keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan PP Nomor 54 Tahun 2017</p> <p>Penyesuaian dari pasal 4 Perda No 5 Tahun 2020 merujuk pada PP No 54 Th 2017 pasal 7 dan Permendagri No 94 Th 2017 pasal 2</p>	<p style="text-align: center;">BAB III MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nomenklatur dan bentuk badan hukum menjadi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>2. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;</li> <li>2. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;</li> <li>3. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan</li> <li>5. memperoleh laba atau keuntungan.</li> </ol>	<p>POJK Nomor 9 Tahun 2024</p> <p>Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 (PP No 54 Tahun 2017 / BAB XI Bagian keempat Privatisasi)</p>
<p>Perubahan, a. Semula pada Perda No 5 Th 2020 Tujuan dan Kegiatan Usaha berada pada BAB III</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV ASAS, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA</p>	

<p>b. Menjadi pada Raperda dipisahkan dalam BAB tersendiri yaitu BAB IV tentang Tujuan dan Kegiatan Usaha</p> <p>Merujuk pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PP No 54 Th 2017 BAB III Pendirian BUMD Bagian ketiga Tujuan Pendirian BUMD pasal 4-15</li> <li>2) Permendagri No 94 Th 2017 BAB II Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat pasal 3</li> <li>3) PP No 54 Th 2017 BAB VII Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan BUMD bagian kedua kerjasama pasal 94</li> <li>4) PP No 54 Th 2017 BAB X Penugasan Pemerintah Kepada BUMD pasal 108</li> <li>5) UU No 4 Th 2023 BAB X Usaha Jasa Pembiayaan bagian ketiga Perizinan pasal 114</li> </ol> <p>Hal ini karena terjadi perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur maka perlu dilakukan perubahan konten dan isi terkait bab tersebut.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan praktik tata kelola yang baik dan berkelanjutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pendirian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;</li> <li>2. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;</li> <li>3. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan</li> <li>5. memperoleh laba.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;</li> <li>b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;</li> <li>c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;</li> <li>d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain;</li> <li>e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;</li> <li>f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>g. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;</li> <li>i. membantu BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah dalam pengelolaan keuangan; dan</li> <li>j. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bekerjasama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.</li> <li>3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilakukan melalui program:</li> </ol>	<p>PP 94 Tahun 2017</p> <p><a href="#">Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan.</a></p> <p>PM 94 Tahun 2017</p> <p>Atau UU P2SK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;</li> <li>b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;</li> <li>c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;</li> <li>d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;</li> <li>e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;</li> <li>f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>g. melakukan kerja sama dengan WK lain dan kerja sama dengan selain WK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;</li> <li>h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau</li> <li>i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan</li> </ol> <p>PM 94 Tahun 2017 Pasal 83 ayat 1 dan 2</p>
---	--	--

<p>(1) Tambahan untuk memperluas cakupan kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)</p>	<p>a. kemitraan;  b. kerjasama operasi; dan  c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>1. Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>2. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS.</p> <p>3. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.</p> <p>4. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. penyertaan modal Daerah;  b. subsidi;  c. pemberian pinjaman; dan/atau  d. hibah.</p> <p>5. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.</p> <p>6. Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memberikan laporan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>1. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.</p> <p>3. Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 108</p> <p>Permendagri  Pasal 51</p> <p><a href="#">(PP No 54 Tahun 2017/ BAB III Bagian Ketiga Tujuan Pendirian BUMD)</a></p> <p><a href="#">(PP No 54 Tahun 2017/ BAB VII Perencanaan, Operasional, Dan Pelaporan BUMD Bagian kedua pasal 94)</a></p> <p><a href="#">(PP No 54 Tahun 2017/ BAB X Penugasan Pemerintah Kepada BUMD Pasal 108)</a></p> <p><a href="#">(UU No 4 Tahun 2023/ BAB X Usaha Jasa Pembiayaan)</a></p> <p><a href="#">(Permendagri No 94 Tahun 2017/ BAB II Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat)</a></p>
--	--	--

<p>Perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Semula pada Perda No 5 Th 2020 Modal berada pada BAB IV tentang Modal</li> <li>Menjadi pada Raperda dipindahkan ke BAB V tentang Modal dan Saham</li> </ol> <p>Merujuk pada</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permendagri No 94 Th 2017 BAB IV Modal dan Saham pasal 8-14.</li> <li>PP No 54 Th 2017 BAB IV Modal BUMD pasal 19-28.</li> </ol> <p>Hal ini karena terjadi perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur maka perlu dilakukan perubahan konten dan isi terkait bab tersebut.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V MODAL DAN SAHAM</p> <p style="text-align: center;">Bagian kesatu Sumber Modal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sumber modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>penyertaan modal Daerah;</li> <li>hibah; dan</li> <li>sumber modal lainnya.</li> </ol> </li> <li>Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>kapitalisasi cadangan;</li> <li>keuntungan revaluasi aset; dan</li> <li>agio saham.</li> </ol> </li> <li>Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban para pemegang saham atas kerugian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Modal Dasar</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</li> <li>Komposisi kepemilikan modal terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Kota Salatiga paling sedikit sebesar 51% (sembilan puluh persen) dari modal dasar; dan</li> <li>Pemerintah daerah lainnya, BUMD lainnya dan/atau masyarakat paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.</li> </ol> </li> <li>Apabila modal dari Pemerintah Daerah lainnya, BUMD lainnya dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum terpenuhi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun, maka sisa modal yang belum terpenuhi tersebut dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penambahan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 Pasal 8</p> <p><i>PP No 54 Tahun 2017/ BAB IV Modal BUMD Pasal 19</i> (pada Perda No 5 Tahun 2020 sumber modal lainnya tidak ada narasi agio saham) Juga merujuk pada BAB XI Bagian keempat privatisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sumber modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>penyertaan modal Daerah,</li> <li>pinjaman;</li> <li>hibah; dan</li> <li>sumber modal lainnya.</li> </ol> </li> <li>Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>APBD; dan/atau</li> <li>konversi dari pinjaman.</li> </ol> </li> <li>Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>Daerah;</li> <li>BUMD lainnya; dan/atau</li> <li>sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Pusat;</li> <li>Daerah;</li> <li>BUMD lainnya; dan/atau</li> <li>sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>kapitalisasi cadangan;</li> <li>keuntungan revaluasi aset; dan</li> </ol> </li> </ol>
---	---	---

Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.

Pasal 16

1. Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
2. Modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 17

1. Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk saham.
2. Saham yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merupakan Saham Atas Nama.
3. Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 19

1. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
  - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
  - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
  - c. menjalankan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

1. Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.

e. agio saham.  
(6) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

Cek pasal 14 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017

[\(PP No 54 Tahun 2017/ BAB IV Modal BUMD Bagian kesatu pasal 19\)](#)

[\(PP No 54 Tahun 2017 BAB IV Modal BUMD Bagian ketiga Pengurangan Modal BUMD\)](#)

[\(PP No 54 Tahun 2017/ BAB III Pendirian BUMD Bagian keenam Anggaran Dasar BUMD\)](#)

	<p>2. Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Perubahan,</p> <p>a. Semula pada Perda No 5 Th 2020 AD berada pada BAB III</p> <p>b. Menjadi pada Raperda dipisahkan dalam BAB tersendiri yaitu BAB VI tentang Anggaran Dasar</p> <p>a. Merujuk pada PP No 54 Th 2017 BAB III Pendirian BUMD Bagian keenam tentang Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Darah Pasal 17</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI ANGGARAN DASAR</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>1. Anggaran Dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan tempat kedudukan;</li> <li>b. maksud dan tujuan;</li> <li>c. kegiatan usaha;</li> <li>d. jangka waktu berdiri;</li> <li>e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;</li> <li>f. jumlah saham;</li> <li>g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;</li> <li>h. nilai nominal setiap saham;</li> <li>i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris, anggota Direksi;</li> <li>j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;</li> <li>k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;</li> <li>l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;</li> <li>m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan</li> <li>n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>PP 54 Tahun 2017 Pasal 17</p> <p>(PP No 54 Tahun 2017/ BAB III Pendirian BUMD Bagian keenam Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Pasal 17)</p>
<p>Penambahan Organ PT BPR Bank Salatiga merujuk pada:</p> <p>a. PP No 54 Tahun 2017 BAB V Organ dan Pegawai BUMD</p> <p>b. Permendagri No 94 Th 2017 BAB V Organ Bank Perkreditan Rakyat</p> <p>c. Permendagri No 94 Th 2017 BAB VI Pegawai Bank Perkreditan Rakyat</p> <p>d. POJK No 9 Th 2024 BAB VI Bagian Ketiga Komite Dewan Komisari Pasal Pasal 59-66</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII ORGAN PT BPR BANK SALATIGA (PERSERODA)</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>1. Organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RUPS;</li> <li>b. Komisaris;</li> <li>c. Direksi;</li> </ol>	<p>PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 29 ayat 3</p>

2. Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua  
RUPS

Pasal 24

1. RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
2. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
3. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
5. Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
6. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

1. Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah dalam RUPS pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
2. Wali Kota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS.
3. Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui kewenangan mandat dan kewenangan delegasi.
4. Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kebijakan terkait:
  - a. perubahan anggaran dasar;

PP Nomor 54 tahun 2017

Permendagri 94 Tahun 2017

- b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
  - g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
5. Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kebijakan selain dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga  
Komisaris

Pasal 26

- 1. Komisaris terdiri dari Anggota Komisaris dan Komisaris Utama yang merangkap sebagai Anggota Komisaris.
- 2. Komisaris diangkat melalui RUPS dan dituangkan dalam Akta Notaris.
- 3. Jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi jumlah Direksi.
- 4. Salah satu Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- 5. Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) kepada Wali Kota.

Pasal 27

- 1. Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan
  - b. memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
- 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:
  - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan

PP Nomor 54 Tahun 2017

Permendagri 94 Tahun 2017

- b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
- 4. Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.
- 5. Komisaris berwenang:
  - a. meneliti rencana strategis bisnis, rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
  - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
  - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
  - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
  - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
  - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
  - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 28

1. Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertanggung jawab kepada RUPS.
2. Pertanggung jawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.

Pasal 29

1. Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
2. Untuk pertama kali anggota Komisaris diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
3. Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 30

PP Nomor 54 Tahun 2017

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.</li> <li>2. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sehat jasmani dan rohani;</li> <li>b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;</li> <li>c. kompetensi;</li> <li>d. reputasi keuangan yang baik;</li> <li>e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;</li> <li>f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;</li> <li>g. berijazah Strata 1 (S-1);</li> <li>h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;</li> <li>i. tidak pernah dinyatakan pailit;</li> <li>j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;</li> <li>k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan</li> <li>l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</li> </ol> </li> <li>3. Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki akhlak dan moral yang baik;</li> <li>b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang sehat; dan</li> <li>d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.</li> </ol> </li> <li>4. Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;</li> <li>b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan</li> <li>c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Komisaris BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.</li> </ol> </li> <li>5. Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.</li> </ol>	<p>(PP No 54 Tahun 2017/ BAB V Organ dan Pegawai BUMD bagian pertama Organ BUMD)</p> <p>(PP No 54 Tahun 2017/ BAB V Organ dan Pegawai BUMD bagian kedua Pegawai BUMD)</p> <p>(Permendagri No 94 Tahun 2017/ BAB V Bagian kedua Organ Bank Perkreditan Rakyat pasal 66)</p> <p>(Permendagri No 94 Tahun 2017/ BAB VI Pegawai Bank Perkreditan Rakyat)</p>
--	--	--

6. Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
7. Anggota Komisaris dilarang:
  - a. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
  - b. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung;
  - c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung;
  - d. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Komite

Pasal 31

Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, Komisaris membentuk komite.

Pasal 32

1. Komisaris PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dengan modal dasar paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk:
  - a. komite audit;
  - b. komite pemantau resiko; dan
  - c. komite remunerasi dan nominasi.
2. Komite yang dibentuk Komisaris bertanggung jawab kepada Komisaris.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Komisaris dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Komisaris.
4. Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan kebijakan yang berbeda mengenai pembentukan komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

POJK Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 57

POJK Nomor 9 Tahun 2024 pasal 59

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian Komite diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komite Audit

Pasal 33

1. Anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, paling sedikit:
  - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
  - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi; dan
  - c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang hukum, perbankan, atau perbankan syariah.
2. Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Minimal 50% anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.
5. Anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memiliki integritas yang baik dan menjaga reputasi.

Komite Pemantau Resiko

Pasal 34

1. Anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, paling sedikit:
  - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
  - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang keuangan atau keuangan syariah; dan
  - c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang manajemen risiko.
2. Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Minimal 50% anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.
5. Anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memiliki integritas yang baik dan menjaga reputasi.

<p>Pasal 57 POJK Nomor 9 Tahun 2024</p>	<p style="text-align: center;">Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, paling sedikit:<ol style="list-style-type: none"><li>a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;</li><li>b. 1 (satu) orang anggota Komisaris BPR selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau pihak yang berasal dari luar BPR yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman yang relevan; dan</li><li>c. 1 (satu) orang pejabat di bawah anggota Direksi yang memiliki kompetensi di bidang sumber daya manusia.</li></ol></li><li>2. Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.</li><li>3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</li></ol> <p style="text-align: center;">Jabatan Rangkap Ketua Komite</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Ketua dari komite Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite pada lebih dari 1 (satu) komite lain.</p> <p style="text-align: center;">Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a. perencanaan dan pelaksanaan audit; dan</li><li>b. pemantauan tindak lanjut hasil audit.</li></ol></li><li>2. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap paling sedikit:<ol style="list-style-type: none"><li>a. pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit internal;</li><li>b. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan</li><li>c. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit internal BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.</li></ol></li><li>3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Komisaris.</li></ol>	
---	---	--

4. Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Pasal 38

1. Komite pemantau risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan paling sedikit:
  - a. evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan BPR; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
2. Hasil evaluasi serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Pasal 39

1. Komite remunerasi dan nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. kebijakan remunerasi paling sedikit:
    - 1) melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian kinerja, kewajaran, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang; dan
    - 2) memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai kebijakan remunerasi.
  - b. kebijakan nominasi paling sedikit:
    - 1) menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Komisaris.
    - 2) mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Komisaris; dan
    - 3) mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dan huruf c serta anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dan huruf c.
2. Anggota komite remunerasi dan nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan pengangkatan dan/atau penggantian

yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.

#### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite

##### Pasal 40

1. BPR wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite.
2. Pedoman dan tata tertib kerja komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite;
  - b. pengaturan rapat komite; dan
  - c. periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala.

#### Rapat Komite

##### Pasal 41

1. Rapat komite diselenggarakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan.
2. Rapat komite audit atau komite pemantau risiko harus dihadiri lebih dari 50% anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
3. Rapat komite remunerasi dan nominasi harus dihadiri lebih dari 50% anggota komite remunerasi dan nominasi, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang pejabat di bawah Direksi yang memiliki kompetensi di bidang sumber daya manusia.
4. Tata cara pengambilan keputusan rapat komite dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja komite.
5. Komite wajib menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Direksi

##### Pasal 42

1. Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Direksi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) paling sedikit berjumlah 2 (dua), salah satu di antaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
4. Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.

5. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 43

1. Direksi bertugas:
  - a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) meliputi:
    - 1) menyusun perencanaan;
    - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
    - 3) pengawasan kegiatan operasional.
  - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
  - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
3. Direksi berwenang:
  - a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
  - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
  - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
  - d. mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
  - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas

- pertimbangan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
  - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan
  - j. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam anggaran dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

Pasal 44

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Direksi bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.
2. Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 45

1. Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
2. Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.
3. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
4. Pengangkatan kembali untuk masa jabatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 46

1. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.
2. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut;
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. kompetensi;
  - d. reputasi keuangan yang baik;
  - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - f. memahami manajemen perusahaan;
  - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - h. berijazah Strata Satu;
  - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
3. Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
4. Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Direksi BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi
5. Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
6. Anggota Direksi dilarang:
- a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris;

	<p>b. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank;</p> <p>c. merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR; dan</p> <p>d. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.</p> <p>7. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Komite Audit menjadi bagian dari komite dewan komisaris karena perubahan bentuk hukum perumda menjadi Perseroda</p> <p>Perda No 5 Th 2020 Pasal 93</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII KEPEGAWAIAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>1. Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merupakan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.</p> <p>2. Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.</p> <p>3. Penghasilan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. gaji;</li> <li>b. tunjangan;</li> <li>c. fasilitas; dan/atau</li> <li>d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.</li> </ol> <p>4. Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>1. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, dana pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Permendagri No 94 tahun 2017</p> <p><a href="#">(PP No 54 Tahun 2017/ BAB V Organ dan Pegawai BUMD bagian kedua Pegawai BUMD)</a></p> <p><a href="#">(Permendagri No 94 Tahun 2017/ BAB VI Pegawai Bank Perkreditan Rakyat)</a></p> <p><a href="#">(UU No 4 Tahun 2023/ BAB XII Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Pensiun)</a></p>

<p>Penambahan sesuai UU No 4 Th 2023 Pasal 148</p> <p>Penambahan sesuai UU No 4 Th 2023 Pasal 148</p> <p>Penambahan sesuai UU No 4 Th 2023 Pasal 148</p> <p>Penambahan sesuai UU No 4 Th 2023 Pasal 134 ayat (9)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dana pensiun dan tunjangan hari tua merupakan kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang dipisahkan.</li> <li>3. Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);</li> <li>b. bagian dari dana kesejahteraan;</li> <li>c. bantuan dari PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);</li> <li>d. usaha-usaha lain yang sah.</li> </ol> </li> <li>4. Iuran pensiun pada dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa iuran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan iuran pegawai.</li> <li>5. Setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) berhak menjadi Peserta Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Pemberi Kerja apabila telah memenuhi syarat kepesertaan dalam Peraturan Dana Pensiun.</li> <li>6. Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memutuskan menjadi Peserta, pegawai harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong upah atau gajinya setiap bulan.</li> <li>7. Peserta dana pensiun dan tunjangan hari tua adalah pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang memenuhi persyaratan mengikuti Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua.</li> <li>8. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun dan tunjangan hari tua diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.</li> <li>2. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 3% dari total beban tenaga kerja tahun sebelumnya.</li> </ol>	<p>POJK No.19 Tahun 2023</p>
<p>Penyesuaian dengan bentuk badan hukum Perseroda yang merujuk pada PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 94 Tahun 2017</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BUMD</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Perencanaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.</li> <li>2. Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</li> </ol>	<p>PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 88</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;</li> <li>b. kondisi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) saat ini;</li> <li>c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;</li> <li>d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;</li> <li>e. nilai dan harapan pemangku kepentingan;</li> <li>f. proyeksi Keuangan; dan</li> <li>g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.</li> </ul> <p>3. Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.</p> <p>4. Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.</p> <p>5. Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Komisaris dan Direksi.</p>	
<p>Permendagri 94 Tahun 2017 pasal 75</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.</li> <li>2. Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan</li> <li>b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.</li> </ul> </li> <li>3. Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.</li> <li>4. Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.</li> </ul>	<p>Permendagri 94 Tahun 2017 pasal 75</p>
<p>Permendagri 94 Tahun 2017 Pasal 76</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan berlaku.</li> <li>(2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.</li> <li>(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>	<p>Permendagri 94 Tahun 2017 pasal 75</p>

(4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 53

1. Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
2. Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
3. Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
4. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditutup.
5. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
6. Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 54

1. Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
2. Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
4. Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
5. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
6. Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Permendagri 94 Tahun 2017 pasal 77

Permendagri 94 Tahun 2017 pasal 78

	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.</li> <li>2. Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (6).</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan keuangan;</li> <li>b. laporan mengenai kegiatan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);</li> <li>c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;</li> <li>d. Laporan keberlanjutan;</li> <li>e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);</li> <li>f. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;</li> <li>g. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan</li> <li>h. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.</li> </ol> </li> <li>2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;</li> <li>b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;</li> <li>c. laporan arus kas;</li> <li>d. perubahan ekuitas; dan</li> <li>e. catatan atas laporan keuangan.</li> </ol> </li> <li>3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h merupakan laporan manajemen.</li> <li>4. Laporan tahunan bagi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.</li> </ol>	<p>Permendagri 94 Tahun 2017 pasal 79</p> <p>Permendagri 94 Tahun 2017 Pasa; 80</p> <p>POJK Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 94</p> <p><a href="#">(PP No 54 Tahun 2017/ BAB VII Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan BUMD)</a></p> <p><a href="#">(Permendagri No 94 Tahun 2017/ BAB VII Perencanaan dan Pelaporan)</a></p> <p><a href="#">(UU No 4 Tahun 2023/ BAB X Usaha Jasa Pembiayaan Bagian Kesembilan Pengawasan dan Pelaporan)</a></p>
	<p>BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA</p> <p>Pasal 57</p>	

<p>Penyesuaian dengan bentuk badan hukum Perseroda merujuk pada Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 dan PP Nomor 54 Tahun 2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun buku PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.</li> <li>2. Penggunaan laba PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.</li> <li>3. Pembagian laba bersih PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bagian laba untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima perseratus);</li> <li>b. cadangan 20% (dua puluh persen);</li> <li>c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);</li> <li>d. tantiem 4% (empat persen);</li> <li>e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan</li> <li>f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).</li> </ol> </li> <li>4. Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.</li> <li>5. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk peningkatan kinerja dan menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.</li> <li>6. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.</li> <li>7. Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Direksi dan Komisaris, yang ditetapkan oleh Direksi.</li> <li>8. Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e digunakan untuk pemberian jasa bagi Pegawai, yang ditetapkan oleh Direksi.</li> <li>9. Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk dana pensiun, tunjangan hari tua, perumahan, sosial dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) tidak boleh membagi laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan ratio Kecukupan Penyediaan Modal paling sedikit kurang dari 12% (dua belas persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian laba kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a ditetapkan dalam RUPS.</li> </ol>	<p>Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 Pasal 82</p> <p>PP No 54 Tahun 2017</p> <p><a href="#">(PP No 54 Tahun 2017/ BAB VIII Tahun Buku dan Penggunaan Laba Pasal Bagian kedua Penggunaan Laba Perusahaan Perseroan Daerah Pasal 105)</a></p> <p><a href="#">(Permendagri No 94 Tahun 2017/ BAB VIII Penggunaan Laba BUMD Pasal 82)</a></p> <p>UU No 40 Tahun 2007 Pasal 70 (Penggunaan Laba)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.</li> <li>(2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.</li> <li>(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.</li> <li>(4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh</li> </ol>
--	--	---

	<p>2. Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dibagikan apabila PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.</p> <p>3. Bagian laba yang menjadi bagian pemegang saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.</p>	<p>dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.</p> <p>UU No 40 Tahun 2007 Pasal 71 (Penggunaan Laba) (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.</p> <p>UU No 40 Tahun 2007 Pasal 72 (Penggunaan Laba) (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.</p>
<p>BAB XI telah dilakukan pepadatan pada raperda pada BAB IV TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA Pasal 10</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI PRINSIP DAN TATA KELOLA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur Pasal 60</p> <p>1 Operasional PT. BPR Bank Salatiga(Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.</p> <p>2 Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.</p> <p>3 Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.</p> <p>4 Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. organ;</li> <li>b. organisasi dan kepegawaian;</li> <li>c. keuangan;</li> <li>d. pelayanan pelanggan;</li> </ol>	<p>POJK Nomor 9 Tahun 2024</p> <p>Cek POJK terbaru</p>

- e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran;
  - i. penelitian dan pengembangan; dan
  - j. pengawasan.
5. Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua  
Tata Kelola  
Pasal 61

- 1 Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:
- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
  - b. tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:
    - 1) keterbukaan;
    - 2) akuntabilitas;
    - 3) tanggung jawab;
    - 4) independensi; dan
    - 5) kewajaran.
  - b. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.
- 2 Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
  - b. mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
  - d. mendorong agar organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
  - e. meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Cek POJK terbaru

	<p>3 Penerapan tata kelola yang baik PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) paling sedikit diwujudkan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aspek pemegang saham;</li> <li>b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;</li> <li>c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komisaris;</li> <li>d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;</li> <li>e. Penanganan benturan kepentingan</li> <li>f. Penerapan fungsi audit internal;</li> <li>g. Penerapan fungsi audit eksternal;</li> <li>h. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti kecurangan. Termasuk pengendalian internal;</li> <li>i. Batas maksimum pemberian kredit PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)</li> <li>j. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan</li> <li>k. Rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</li> </ol> <p>4 Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB XII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penggabungan dan peleburan mengakibatkan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.</li> <li>2 Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.</li> </ol>	<p>PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 125</p>

	<p>2 Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>3 Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>1 Pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>2 Fungsi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>3 Kekayaan daerah hasil pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>1 Pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat terjadi karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak mampu beroperasi lagi;</li> <li>b. berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; atau</li> <li>c. atas permintaan pemegang saham.</li> </ol> <p>2 Dalam hal terjadi pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.</p> <p>3 Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4 Tata cara dan persyaratan pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Dilakukan pematatan pada raperda BAB XII PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN</p>		
<p>Dilakukan penyesuaian berdasarkan bentuk badan hukum dari perumda menjadi perseroda yang merujuk pada PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 127</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIII KEPAILITAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>1 PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2 Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari RUPS.</p>	<p>PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 127</p>

	<p>3 Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.</p> <p>4 Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan pailit.</p> <p>5 Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.</p>	
<p>Dilakukan penyesuaian yang merujuk pada Permendari Nomor 94 Tahun 2017</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIV PERHIMPUNAN BPR</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>1 PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) menjadi anggota Perhimpunan BPR.</p> <p>2 PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.</p>	<p>Permendari Nomor 94 Tahun 2017</p>
<p>Dilakukan pematatan pada Pada Pasal 10</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>1 Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan oleh Wali Kota Salatiga.</p> <p>2 Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretaris Daerah; dan</li> <li>b. pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD.</li> </ol> <p>3 Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis</p>	

	<p>4 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>1 PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) melaksanakan pengawasan internal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</p> <p>2 Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.</p> <p>3 Segala hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>Dihapus dengan pertimbangan fleksibilitas pemberian tunjangan kepada Dewan komisaris, Direksi dan Pegawai Perumda BPR Bank Salatiga</p>		
<p>Perubahan sesuai dengan bentuk badan hukum dan nomenklatur yang baru</p> <p>Penambahan sesuai dengan pasal 314 UU No 4 Th 2023</p> <p>Perubahan sesuai dengan bentuk badan hukum dan nomenklatur yang baru</p>	<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>1 Proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.</p> <p>2 Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga tetap beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3 KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>4 Dewan Pengawas dan Direksi karyawan Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.</p>	<p>UU Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 314 Ayat d</p> <p>Pasal 314</p> <p><b>C.</b> Perubahan nomenklatur 'Bank Perkreditan Rakyat' menjadi 'Bank Perekonomian Rakyat' maksimal 12 Januari 2025 atau 2 tahun sejak UU No 4 Tahun 2023 Terbit.</p> <p><b>D.</b> Perubahan bentuk badan hukum ke Perseroan Terbatas diberikan waktu hingga 3 tahun.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal terhadap Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga masih berlaku sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	
<p>Perubahan sesuai dengan perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur yang baru</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.</p>	<p>UU No 4 Tahun 2023 Pasal 314</p> <p>A. “Nomenklatur ‘Bank Perkreditan Rakyat’ yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan ‘Bank Perekonomian Rakyat’ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”</p> <p>C. “Perubahan nomenklatur ‘Bank Perkreditan Rakyat’ menjadi ‘Bank Perekonomian Rakyat’ dan ‘Bank Pembiayaan Rakyat Syariah’ menjadi ‘Bank Perekonomian Rakyat Syariah’ dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”</p>